

nawala

edisi 9
volume 7

Buku Bulan ini

Pedoman Penanganan: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi

- Analysis of the Performance Management of the Corruption Eradication Commission in Optimizing the Recovery of State Losses
- Implementation of Social Assistance in the Era of the COVID-19 Pandemic: Evaluation of Transparency and Accountability Aspects

Koleksi Bulan ini!

- Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal
- Transfer Dana & Tindak Pidana Pencucian Uang
- Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
- Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
- Membatasi Transaksi Tunai: Peluang dan Tantangan
- Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia



Gedung Merah Putih KPK Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

PEDOMAN PENANGANAN: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMULIHAN ASET DI PASAR MODAL

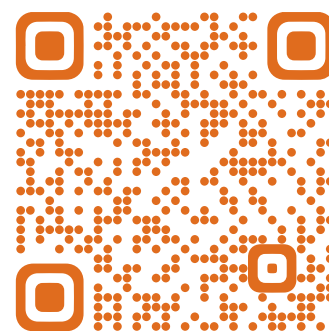
Pasar modal merupakan salah satu tempat investasi yang digemari oleh masyarakat saat ini. Masyarakat menggemari bertransaksi di pasar modal karena beberapa hal, salah satunya, sebagai sarana investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih menguntungkan karena dapat memperoleh bunga majemuk (*compound interest*) daripada menyimpan uang di bank yang keuntungannya sudah ditentukan oleh bank berdasarkan suku bunga SBI (*BI Rate*). Selain itu dengan berinvestasi di pasar modal dapat memperoleh keuntungan yang lebih, melalui transaksi yang spekulatif. Sebagai tempat yang bebas intervensi otoritas dalam penentuan harga efek dan imbal hasil efek, pasar modal dapat menjadi tempat untuk memperoleh keuntungan yang lebih melalui selisih harga jual dengan harga beli saham.

Alasan mengapa pasar modal digemari oleh masyarakat karena merupakan tempat untuk menghindari deteksi otoritas perbankan dan tempat pencucian uang. Beberapa oknum menggunakan pasar modal sebagai tempat untuk melakukan tindak kejahatan. Banyaknya pelaku yang terlibat dalam transaksi pasar modal; sifat transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh (*remote trading*) dan tanpa warkat (*scriptless*); produk-produk pasar modal yang beragam dengan proses bisnis yang cukup kompleks; serta nilai transaksi dan kapitalisasi pasar modal yang tinggi membuat para oknum pelaku kejahatan menginvestasikan uang "haram" mereka di pasar modal. Salah satu yang pernah melakukan hal ini adalah M. Nazaruddin yang merupakan mantan anggota DPR dan bendahara umum Partai Demokrat. Ia menerima pembayaran berupa cek dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan mendapatkan proyek. Cek tersebut dicairkan lalu disimpan di brankas Permai Grup atas sepengetahuan Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Permai Grup). Adapun segala penggunaan dari uang tersebut harus berdasarkan perintah dari Muhammad Nazaruddin dan/atau Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Sebagian dari uang tersebut dialihkan ke



pasar modal dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul uang. Terbukanya pasar modal sebagai tempat melakukan tindak pidana pencucian uang seharusnya menjadi perhatian otoritas berwenang dalam mengawasi pasar modal sebagai tempat pencucian uang.

Buku ini menjadi salah satu panduan yang cocok bagi pihak berwajib dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di pasar modal. Buku ini disusun berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait yang memiliki kompetensi di bidang tindak pidana pencucian uang serta pasar modal. Pembahasan di dalam buku ini cukup komprehensif serta mendalam, buku ini mengajak pembaca untuk mengetahui pasar modal dan pencucian secara umum sebelum memberikan panduan-panduan kepada pembaca mengenai cara mengungkap hingga memulihkan aset-aset pencucian uang. Tidak lupa dalam buku ini banyak sekali dilampirkan contoh-contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang dapat membantu pembaca yang khususnya pihak berwajib untuk dapat mengungkap kasus-kasus pencucian uang di pasar modal yang saat ini masih kecil kasusnya di Indonesia.

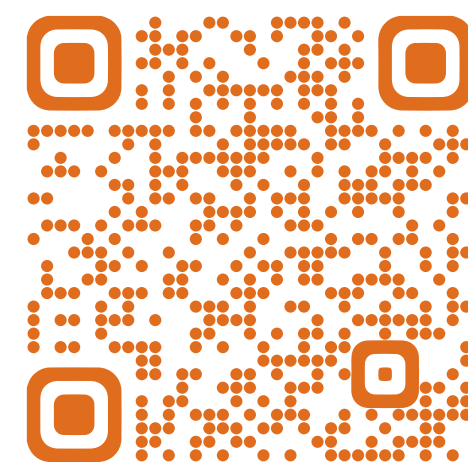


Penulis : Direktorat PJKAKI, KPK
Penerbit : KPK
Tahun Terbit : 2018
Tebal Buku : 236

Analysis of the Performance Management of the Corruption Eradication Commission in Optimizing the Recovery of State Losses

Taryanto, Eko Prasajo

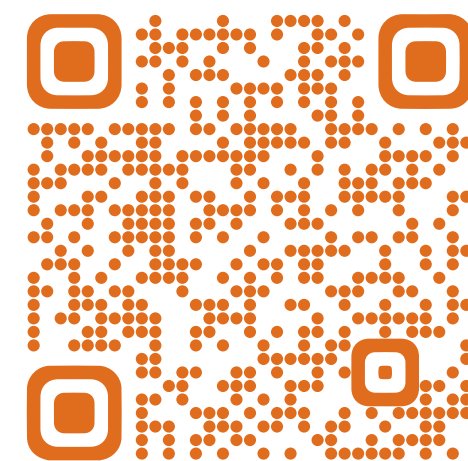
The achievement of recovery of state losses due to the performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) is considered not optimal, which indicates a problem in its performance management. Therefore, this research aims to find a micro (organizational) strategy for optimizing the recovery of state losses using the Balanced Score Card Model. The problem of recovering state losses at the Corruption Eradication Commission will be analyzed using general policy theory, specifically the balanced scorecard (BSC) performance management theory and asset recovery theory. Overall, the balanced scorecard in measuring the performance of the Corruption Eradication Commission in recovering state losses due to corruption is still said to be sufficient, with a total score of 73%, meaning that KPK cannot achieve a balance between one perspective and another. In the qualitative analysis, the factors that influence the optimization of loss recovery are (1) The regulations applied are not optimal, especially in determining the penalties and fines obtained by the suspect; (2) Case arrears and less in terms of quality and quantity of cases investigated; (3) The quantity and quality of Human Resources are still low; 4) Synergy between the Corruption Eradication Commission and other Law Enforcement Apparatuses, which are still colliding with ego-sectoral conflicts.



Implementation of Social Assistance in the Era of the COVID-19 Pandemic: Evaluation of Transparency and Accountability Aspects

Dumilah Ayuningtyas, Humaatul Islam, et. all

The COVID-19 Virus has spread worldwide at an alarming rate, infecting millions who are expecting government assistance during the pandemic. This research aimed to evaluate the distribution process of the social assistance provided by the Indonesian government during the COVID-19 Pandemic. A quick online survey was conducted on 279 respondents from 12 provinces in Indonesia. Furthermore, interviews were also conducted with seven informants to strengthen the quick survey's results, a form of triangulation method. The results show that most respondents felt that the distribution of social assistance during the pandemic was not transparent and on target, partly due to separate budget allocations between several ministries, inaccurate data and unintegrated data. Strengthening the role of local government and increasing the involvement of community organizations as well as the flexibility to adjust the form and mechanism of social assistance, are the recommendations of this study.



Koleksi Bulan Ini!



01

Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Buku ini dihadirkan untuk mempersempit kesenjangan pemahaman akan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Pemahaman mengenai Undang-Undang TPPU harus dibangun pada semua lapisan masyarakat, terutama pelaku di bidang industri keuangan dan tidak dititikberatkan pada salah satu industri keuangan.

Transfer Dana & Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku ini dilatarbelakangi dengan memudahkan akses masyarakat luas mendapatkan naskah undang-undang tentang transfer dana dan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang untuk memberikan kepastian hukum.

02



Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Menindak setiap pelaku kejahatan adalah penting, namun jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana upaya dan cara kita untuk mencegah terjadinya kejahatan.



03

Koleksi Bulan Ini!



04

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku anotasi ini mengandung makna adanya upaya memformulasikan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam satu putusan serta mengkritisi kekeliruan dalam penanganan perkara tindak pidana.

Membatasi Transaksi Tunai: Peluang dan Tantangan

Meningkatnya frekuensi transaksi keuangan tunai di tengah masyarakat ternyata berbanding lurus dengan maraknya kasus korupsi dan pencucian uang yang terungkap dengan menggunakan uang tunai.

05



Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia

Buku ini memaparkan ihwal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dimulai dengan pemaparan mengenai pengertian dan proses kejahatan pencucian uang.



06